

Peran Kepemimpinan Kepala Kalurahan Tepus untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kalurahan

Masruri

STISIP Kartikabangsa Yogyakarta
Email:ahmad.masruri1980@gmail.com

Abstrak

Kepemimpinan Kepala Kalurahan merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan Kalurahan yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seorang Kepala Kalurahan juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan Kalurahan semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang kondusif dan harmonis sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan Kalurahan semakin baik akan bisa terwujud. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kepala Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, program pembangunan yang sedang dilaksanakan, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang ada di Kalurahan. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, triangulasi teknik (observasi, wawancara, dokumentasi) maupun triangulasi sumber untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dalam melaksanakan program Kalurahan. Hasil penelitian ditemukan (1) karakter masyarakat Kalurahan Tepus adalah masyarakat yang mudah untuk diajak berpartisipasi, tetapi hanya pada partisipasi non finansial.(2) program yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kalurahan Tepus adalah pelaksanaan program fisik dan non fisik.(3) peran Kepala Kalurahan dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat Kalurahan Tepus adalah dengan menggunakan strategi partisipasi non finansial, melibatkan masyarakat pada MUSRENBANG dan melakukan pendekatan kepada warga masyarakat, dan (4) partisipasi masyarakat Kalurahan Tepus mulai dari perencanaan, pelaksanaan. tetapi masih belum terlihat adanya partisipasi dalam hal evaluasi.

Kata kunci : Peran Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat Kalurahan

Abstract

The leadership of the head of the village is an important factor in determining the progress of the village which is his responsibility, but it is also impossible for the head of the village to carry out his duties and responsibilities to make the village more advanced without the support and participation of the community, for that leadership and participation from the community must work. concurrently and in line in order to create a conducive and harmonious atmosphere so that the goals and ideals to make the village better will be realized. The purpose of this study was to analyze the role of the Head of Village in increasing community participation, development programs that are being implemented, and forms of community participation in implementing existing programs in the Village. The method used is by using a qualitative approach, technical triangulation (observation, interviews, documentation) and triangulation of sources to find out what actually happened in the Kalurahan administration system in implementing the Kalurahan program. The results of the study found (1) the character of the Tepus Village community is a community that is easy to invite to participate, but only on non-financial participation. (2) the program being run by the Tepus Village government is the implementation of physical and non-physical programs. (3) the role of the Head of the Tepus Village in terms of increasing the participation of the

people of Kalurahan Tepus is to use a non-financial participation strategy, involving the community in MUSRENBANG and making approaches to the community members, and (4) participation of the people of Kalurahan Tepus starting from planning, implementation. but there is still no visible participation in the evaluation.

Keywords : The Role of Leadership, Participation of the Village Community

PENDAHULUAN

Persaingan di era globalisasi saat ini menuntut pembangunan di segala bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan aspek kehidupan yang lain harus terus dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi persaingan tersebut. Dengan adanya pembangunan di segala bidang tersebut maka akan terjadi perbaikan dan perubahan dari titik tertentu menjadi lebih baik. Oleh karena itu pembangunan harus dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik dari semua lapisan, antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintah yang sudah memperoleh legitimasi dari rakyat.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dalam perspektif good governance tidaklah semata-mata didasarkan kepada pemerintah (government) atau Negara (state) saja, tetapi harus melibatkan seluruh komponen, baik dalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi publik (masyarakat). (Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi : 2011 :2). Pemerintah merupakan penjelmaan rakyat wajib melakukan pembangunan melalui program-program yang telah dibuat oleh pemerintah yang tentunya didasarkan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai UU No. 32 tahun 2004 yang terdiri dari : (a) asas kepastian hukum; (b) asas tertib penyelenggara Negara; (c) asas kepentingan umum; (d) asas keterbukaan; (e) asas profesionalitas; (f) asas proporsionalitas; (g) asas akuntabilitas; (i) asas efektifitas.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Otonomi merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan konsep otonomi daerah maka akan lebih terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan penyelenggaraan pembangunan, karena masyarakat bisa langsung menyuarakan pada pemerintahan daerah tanpa perlu datang ke pemerintahan pusat. Dan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah maka pemerintah daerah wajib menampung semua aspirasi masyarakat untuk dijadikan rekomendasi dalam mengambil kebijakan dalam hal pembangunan.

Pemerintah daerah yang dimaksud dalam UU No. 32 tahun 2004 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi Negara dalam lingkungan pemerintahan daerah yang lainnya. Dengan adanya keleluasaan wewenang yang diberikan kepada daerah yang otonom, maka format dan isi otonomi daerah akan berbeda satu sama lainnya, pemerintah daerah yang semula menjadi pelaku utama pembangunan mengalami pergeseran menjadi pelayan masyarakat (Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi ; 65).

Dalam setiap program pemerintahan yang telah direncanakan oleh pemerintah wajib di sosialisasikan kepada masyarakat atau dalam setiap penyusunan program baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat Kalurahan seharusnya masyarakat juga mempunyai andil. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya

maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Kepala Kalurahan juga seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan. Karena masyarakat juga bagian dari suksesnya program Kalurahan, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar yang menjadi cita-cita bersama yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan kondisi masyarakat Kalurahan Tepus masih banyak yang tidak mengetahui program Kalurahan yang sedang dilaksanakan, peneliti menganggap kondisi masyarakat yang tidak mengetahui program pelaksanaan pembangunan akan berdampak pada pelaksanaan partisipasi masyarakat. Perlu adanya peran dari Kepala Kalurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kalurahan Tepus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik masyarakat yang ada di Kalurahan Tepus.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian dari suatu penelitian merupakan strategi dalam mengatur penelitian supaya peneliti memperoleh data yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini.

1. Rancangan Penelitian.

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986:9) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan di lakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode ilmiah, dan di lakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. (Lexy J. Moleong, 2004:5). Dengan demikian penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian secara alamiah yang bersumber pada pengumpulan data.

2. Subyek Penelitian.

Subyek dalam penelitian ini adalah BPD, Kepala Kalurahan, Tokoh masyarakat dan warga Kalurahan Tepus.

3. Kehadiran peneliti.

Ciri penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, dalam tahap ini peneliti masuk sebagai instrumen utama, kehadiran peneliti tidak dapat di gantikan dan di wakikan siapapun, karena peneliti disini di jadikan sebagai instrumen utama di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data.

Dengan hadirnya peneliti maka hasil penelitian akan lebih optimal, di karenakan peneliti dapat mengetahui keadaan obyek penelitian secara langsung seperti lingkungan sosial, pendidikan, fisik dan tokoh- tokoh yang akan di teliti.

4. Lokasi penelitian.

Penelitian "Peran Kepemimpinan Kepala Kalurahan Tepus Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kalurahan.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu

1. Observasi

Nasution (2008) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi secara jelas. Observasi digunakan untuk mengambil data partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara digunakan untuk mengambil data Peran Kepemimpinan Kepala Kalurahan Tepus untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kalurahan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data mengenai pelaksanaan program pembangunan Kalurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan hasil penelitian merupakan hasil analisis peneliti dari data di lapangan tentang peran Kepala Kalurahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kalurahan untuk berpartisipasi terhadap program-program Kalurahan. Temuan hasil penelitian sebagai berikut.

Karakter Masyarakat Kalurahan Tepus

Masyarakat pada suatu daerah biasanya memiliki sebuah karakter yang mungkin berbeda dengan karakter masyarakat pada daerah yang lain, oleh karena itu berikut ini adalah pemaparan karakter masyarakat Kalurahan Tepus berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa subyek. Pada umumnya masyarakat Kalurahan Tepus merupakan masyarakat yang mudah untuk diajak berpartisipasi dalam program Kalurahan. Hal itu bisa terlihat dari petikan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu ketua RT Kalurahan Tepus, yaitu Abdul Kholik(wawancara pada tanggal 22 Februari 2022), yang mengatakan :

“Guampang, masyarakat kene iku guampang, gag onok sing rewel nek dijak kegiatan, selama aku nyekel RT kene guampang”. (Mudah sekali, masyarakat disini itu mudah, tidak ada yang rewel kalau diajak kegiatan, selama saya jadi RT disini itu mudah.(data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan Imam Mawardi)

Hal yang senada juga dikatakan oleh bapak Imam Mawardi seorang RW sekaligus Tokoh Masyarakat Kalurahan Tepus(wawancara pada tanggal 22 Februari 2022). Yang mengatakan:

“Masyarakat Kalurahan Tepus iku gampang, apalagi warga Pedukuhn, iku tak ancungi jempol, wargane kompak kabeh. Tapi onok sing angel, malah kesane iku ngendon-ngendoni, lha sing angel iku malah wong sing pinter, Tokoh Masyarakat yoan. Tapi sing liyane iku makmum ae. Gampang”.(Masyarakat Kalurahan Tepus itu mudah, apalagi warga Pedukuhn, itu saya ancungi jempol, warganya kompak semua. Tapi ada yang susah, malah terkesan meremehkan. Yang susah itu malah orang pintar, Seorang Tokoh masyarakat pula).(data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan Abdul Cholik)

Masyarakat Kalurahan Tepus merupakan masyarakat yang mudah diajak untuk berpartisipasi terhadap apapun yang bisa menjadikan Kalurahan lebih baik, tetapi masyarakat harus diberi tahu dahulu dan diberikan pengertian terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kalurahan, karena masyarakat Kalurahan Tepus merupakan masyarakat yang tidak selalu aktif untuk mencari informasi proses perkembangan Kalurahan tetapi mereka akan mau berkerja sama bila ada ajakan untuk ikut berpartisipasi. oleh karena itu masyarakat terkesan tidak tahu akan program Kalurahan karena memang mereka tidak diberikan sebuah sosialisasi dalam bentuk tertulis dan proses penyampaian program Kalurahan hanya sampai pada RT atau RW. Sedangkan tidak mungkin jika proses sosialisasi dilakukan di balai Kalurahan dengan mengundang semua warga Kalurahan.

Program-Program yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Tepus.

Program Kalurahan yang telah direncanakan membutuhkan suatu formula yang bisa menjadikan program Kalurahan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Formula tersebut adalah partisipasi dari masyarakat, masyarakat pada dewasa ini merupakan masyarakat yang sudah mengerti akan suatu sistem pemerintahan, tetapi tidak jarang dari mereka yang bersikap apatis terhadap kemajuan lingkungan mereka. Oleh karena perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar yang menjadi cita-cita bersama yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan. Dan pemerintah Kalurahan telah membuat sebuah program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Program Kalurahan Tepus adalah sebagai berikut sesuai RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) :

Pembangunan Infrastruktur

Paving Program Non Fisik

1. BKD (Badan Kredit Kalurahan)
2. SPP (Simpan Pinjam Perempuan)
3. KOPWAN (Koperasi Wanita)
4. PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis PerKalurahan)
5. PDM-DKE (Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi)

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Kalurahan.

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam program-program Kalurahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kalurahan Tepus diantaranya:

1. Perencanaan Program

Terlihat dari beberapa wawancara dalam hal proses penyusunan program-program pembangunan Kalurahan Tepus bentuk partisipasi masyarakat sudah diwakili oleh beberapa pihak, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdul Kholik :

“nek onok opo-opo iku koyok pamong, koyok RT, paduhuan iku diceluk, istilahne iku ngurusi kabeh lah, nek katene onok kegiatan nang deso iku melok kabeh, apik lah”. (kalau ada apa-apa itu seperti pamong, seperti RT, RW itu dipanggil, istilahnya itu ikut mengurus lah, kalau ada kegiatan di Kalurahan itu ikut semua, bagus lah). (wawancara tanggal 20 Februari 2022. Data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan bapak Kepala Kalurahan)

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Bapak Supardi, Kepala Kalurahan Tepus yang sudah terpilih selama dua periode ini :

“Sebetulnya pelaksanaan program-program pembangunan Kalurahan Tepus selama ini sudah dilaksanakan langsung partisipasi masyarakat yang ditangani oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, KPMD, TPK (Tim Pengelola Kegiatan), dan juga perangkat yang lain yang tertuang dalam RPJMDes yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas”. (Data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil observasi peneliti)

Disamping hasil dari wawancara, peneliti juga mengobservasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Kalurahan mengenai informasi pendanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PeKalurahan) Tahun 2022, yang dilakukan di Balai Kalurahan Tepus yang mengundang beberapa masyarakat, dalam kegiatan tersebut bukan hanya sosialisasi satu arah, tetapi masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berbicara maupun mengeluarkan pendapat mereka. Dari hal itu merupakan bukti bahwa proses kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dan masyarakat sudah cukup baik, masyarakat bisa langsung mengeluarkan pendapat mereka, dan juga mereka mempunyai beberapa wakil yang bisa diharapkan dapat menyalurkan aspirasi mereka.

2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program yang ada di Kalurahan Tepus diserahkan kepada koordinator

masing-masing program. Dan untuk pembangunan yang ada di Kalurahan Tepus dilaksanakan secara suakelola dan rekanan. Untuk program pembangunan yang dilaksanakan secara sua kelola maka masyarakat bisa lebih ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, tetapi untuk program pembangunan yang dilakukan rekanan, CV merupakan pelaksana program tersebut. Kepala Kalurahan Tepus mengungkapkan :

“untuk pembangunan paving yang di mulai dari Pos Doreng sampai Radio Pendowo dilaksanakan oleh CV, bukan sua kelola, tetapi ada juga pembangunan yang ditangani langsung oleh masyarakat sendiri” (wawancara tanggal 23 Februari 2022. Data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan).

Untuk pembangunan yang dilaksanakan secara sua kelola pernah diungkapkan oleh salah satu warga: “saya pernah disuruh untuk ikut membangun plengsengankali, ya itu saja yang pernah saya lakukan.(wawancara pada tanggal 23 Februari 2022) . Sedangkan untuk program yang non fisik, untuk pelaksanaan program dilaksanakan berdasarkan pendistribusian koordinator program, dimana untuk koordianator diambil dari masyarakat Kalurahan.

Seperti yang diungkapkan Yetty Puspawati :

“program Kopwan pelaksanaannya setiap tanggal 8 setiap bulannya, untuk tempatnya di kantor Kalurahan, pak lurah sudah memberikan amanat kepada kita untuk mengelola program ini”n(wawancara tanggal 25 Februari 2022. Data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil observasi)

3. Evaluasi Program

Dalam setiap selesai pelaksanaan program sudah seharusnya evaluasi program itu dilaksanakan, tetapi dalam tahap evaluasi ini masyarakat kurang berpartisipasi dan memang kurang dilibatkan.

Abdul Cholik pada tanggal 23 Februari 2022 mengungkapkan :

“aku tahu diajak mlengseng kali, tapi mari ngunu yo wes, gag diajak kumpulan maneh, ngunu iku pamonge wes ngatasi makane aku gag diajak”

(saya pernah diajak untuk membangun plengsengan sungai, tapi setelah itu ya sudah, tidak diajak kumpul lagi, begitu itu pamong sudah bisa mengatasi makanya saya tidak diajak). Data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan S. Asy'ari)

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Imam, salah satu ketua RW yang ada di Kalurahan Tepus.

“setiap akan mengadakan kegiatan kita pasti dapat undangan, tapi untuk evaluasi saya kira belum pernah”.(wawancara pada tanggal 23 Februari 2022).

Salah seorang kepala sekolah sekaligus koordinator program PDM-DKE mengungkapkan hal yang hampir sama:

“saya tidak tahu bagaimana proses pembangunan tersebut setelah selesai dilaksanakan, dan saya juga tidak pernah mencari tahu”.(wawancara pada tanggal 26 Februari 2022)

Peran Kepala Kalurahan Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Kalurahan Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintahan Kalurahan adalah Kepala Kalurahan. Adapun tugas dan kewajiban Kepala Kalurahan adalah salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Oleh karena itu Kepala Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak mungkin dilakukan sendiri, Kepala Kalurahan juga perlu partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan program pembangunan yang ada di Kalurahan. Peran Kepala Kalurahan sangat diperlukan dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program-program Kalurahan. Dan upaya Kepala Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kalurahan ditunjukkan dengan cara :

1. Dalam Program Fisik

a. MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Kepala Kalurahan selalu melibatkan beberapa elemen masyarakat yang dianggap representative mewakili semua masyarakat secara keseluruhan, karena terbatasnya tempat dan juga kondisi yang sangat tidak memungkinkan jika semua masyarakat dikumpulkan jadi satu.

“secara keseluruhan dari masyarakat tidak akan memungkinkan karena tempat tidak memadai, melalui perwakilan baik itu RT, RW, LPMD, BPD yang dilaksanakan melalui MUSRENBANG. (hasil wawancara dengan Kepala Kalurahan pada tanggal 23 februari 2022).

Hal itu dibenarkan oleh Tokoh Masyarakat Kalurahan Tepus yang sekaligus menjadi ketua Karangtaruna. Yaitu bapak Imam Mawardi:

“mesti onok undangan kanggo musyawarah nang balai Kalurahan, kabeh RT, padukuhan diundang, tapi aku jarang melok, sing tak kongkon budal yo RT, soale biasane suwi nek musyawarah iku, mbulet ae. Mestine sakdurunge iku wes onok draft e dadine iso luweh cepet”.(pasti ada undangan untuk musyawarah di balai Kalurahan, semua RT, RW diundang, tapi saya jarang hadir karena biasanya lama kalau musyawarah itu. Berbelit-belit. Seharusnya sudah ada. Draftnya, jadinya bisa lebih cepat).

Peneliti pernah mengamati kegiatan yang ada di balai Kalurahan Tepus, dimana terdapat beberapa perangkat Kalurahan yang sedang mengadakan pertemuan di pendopo balai Kalurahan.

b. Penggunaan Strategi Partisipasi non Finansial

Selain itu peranan Kepala Kalurahan dalam meningkatkan kesadaran warganya adalah dengan mengupayakan untuk sementara tidak meminta partisipasi dari warga berupa finansial.

“Kepala Kalurahan menarik uang sekecil apapun untuk pembangunan akan timbul dampak negatif, tetapi Kalurahan meminta sumbangan berupa konsumsi meskipun nilainya lebih besar mereka merasa senang. (hasil wawancara dengan Kepala Kalurahan pada tanggal 23 februari 2022).

Hal yang sama juga dikatakan oleh A. Muzhakir Walad, Kasi Pembangunan Kalurahan Tepus :

“selama ini partisipasi masyarakat hanya berupa bantuan konsumsi, dan untuk partisipasi yang lain belum terlihat”.(wawancara tanggal 24 Februari 2022)

Dalam hal tersebut dapat terlihat bagaimana peran Kepala Kalurahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program Kalurahan adalah menggunakan strategi dalam tahap perencanaan mengundang beberapa elemen wakil masyarakat tetapi masih ada kendala dari sistem musyawarah yang terlalu berbelit- belit yang mengakibatkan salah satu elemen dari wakil masyarakat yang seharusnya bisa memberikan masukan dan juga ide-ide yang mungkin bisa lebih memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas Kalurahan menjadi malas untuk ikut hadir dalam proses perencanaan program Kalurahan yang akan dilaksanakan. Dan pada tahap pelaksanaan program, Kepala Kalurahan meminta partisipasi dari masyarakat Kalurahan dengan tidak menyinggung finansial, tetapi Kepala Kalurahan meminta partisipasi dengan bentuk yang lain, misalkan dengan meminta sumbangan konsumsi yang meskipun pada dasarnya nilainya lebih besar. Dan hal itu berhasil dilaksanakan dengan baik.

Kepala Kalurahan yang peneliti wawancarai pada tanggal 23 Februari mengungkapkan:

“Pembangunan Kalurahan memang seharusnya didukung oleh dana swadaya partisipatif dari warga, tetapi mengingat karakteristik warga yang sebagian besar masih mengharapkan bantuan dari pemerintah (baik pusat, provinsi, maupun kabupaten), mengingat karakter warga masyarakat yang demikian maka pemerintah Kalurahan Tepus belum menggali sumber dana swadaya masyarakat, namun partisipasi

masyarakat dalam bentuk konsumsi responnya sangat bagus”.

c. Pendekatan terhadap warga

Selain dari pada itu Kepala Kalurahan juga mendapat penilaian yang positif dari masyarakat terhadap kinerja beliau, terbukti dengan terpilihnya beliau selama 2 periode masa jabatan. Hal itu pernah diungkapkan oleh seorang pensiunan guru yang juga merupakan warga Kalurahan Tepus. “saya senang punya Kepala Kalurahan yang bisa dekat dengan warga, setiap ada undangan yo mesti teko, kalau ada warga yang meninggal beliau juga selalu ikut ta’ziyah”. (wawancara tanggal 24 Februari 2022).

Figur seorang pemimpin juga harus bisa memberikan kesan yang positif kepada warganya dan bukan hanya pencitraan ketika menjelang pemilihan umum saja, tetapi memang benar-benar loyalitas dan juga mampu memimpin dengan baik, karena faktor subyektifitas masih sangat mungkin terjadi. Dengan adanya kesan yang positif dari masyarakat maka akan lebih mudah proses interaksi dan juga komunikasi antar semua lapisan masyarakat semakin bisa berjalan dengan baik sehingga terciptanya suatu kondisi yang harmonis dan dengan sendirinya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap program Kalurahan bisa terwujud.

2. Dalam Program Non Fisik

Untuk program yang non fisik, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, Kepala Kalurahan hanya berperan dalam hal mencari terobosan-terobosan dan mencari peluang yang bisa dijadikan untuk sarana peningkatan ekonomi warga. Dan untuk pelaksanaan program dipercayakan penuh kepada ketua dari masing-masing program yang ada.

a. SPP (Simpan Pinjam Perempuan)

Program Simpan Pinjam Perempuan merupakan program yang juga sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kalurahan Tepus yang secara pengelolaannya sudah dipercayakan kepada koordinator program SPP.

“Kepala Kalurahan tidak perlu repot-repot untuk ikut mengurus SPP, sudah jadi tanggung jawab saya beserta anggota untuk bisa mensukseskan program ini dan bisa menjadikan perekonomian warga bisa sedikit lebih baik”.(wawancara tanggal 27 Februari 2022).

b. KOPWAN (Koperasi Wanita)

Dalam kegiatan koperasi wanita ini Kepala Kalurahan juga telah mempercayakan proses pelaksanaannya kepada koordinator.

“peran Kepala Kalurahan adalah memberikan kami kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola program ini, dan untuk selanjutnya kita lah yang lebih berperan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat untuk ikut dalam program ini”.(wawancara tanggal 25 Februari 2022)

c. PDM-DKE (Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi).

Program PDM-DKE sudah berjalan hampir 10 tahun, program tersebut merupakan program yang dilaksanakan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Untuk peran Kepala Kalurahan dalam hal ini adalah sebagai Pembina program. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Syaiful Asy’ari pada tanggal 25 Februari 2022

“peran Kepala Kalurahan ya sebagai Pembina, untuk prosesnya saya dibantu oleh beberapa koordinator dan POKMAS di tiap wilayah”.(data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan bapak Kepala Kalurahan)

3. Hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan program-program Kalurahan

Dalam setiap pelaksanaan program bukan tidak mungkin terjadi beberapa kejadian yang tidak diinginkan, dan tidak sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Hambatan-hambatan tersebut juga dialami oleh pemerintah Kalurahan Tepus, diantaranya:

a. Program Fisik

Buruknya kualitas pembangunan yang dilakukan CV

Dalam beberapa program pembangunan infrastruktur yang ada di Kalurahan Tepus dilaksanakan secara rekanan, yang artinya adalah pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh CV, dan beberapa hasil dari pembangunan tersebut kualitasnya tidak seperti yang diharapkan. Belum beberapa tahun sudah rusak.

“ada beberapa pembangunan yang dilakukan rekanan, bukan sua kelola, yang dilakukan oleh CV, hasilnya tidak sesuai harapan, belum beberapa tahun sudah rusak”(pada saat sosialisasi informasi pendanaan PNPM-MPd, Sabtu 23.

Februari 2022. Data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil observasi dan dokumentasi)

b. Program Non Fisik

- 1) Masyarakat kurang memahami program yang sedang dilaksanakan seperti diungkapkan oleh Kepala Kalurahan berikut ini :

“Sebagian besar warga kurang menyadari program yang sedang dilaksanakan oleh Kalurahan, seperti misalnya program pembagian sembako untuk orang miskin, banyak yang minta sembako padahal bukan orang miskin”.(wawancara tanggal 23 Februari 2022).

Dan setiap program Kalurahan apabila tidak disosialisasikan dengan baik maka akan terjadi kesalah pahaman, maka dari itu perlu adanya suatu pembenahan sistem sosialisasi yang selama ini mungkin masih banyak kekurangan. Selama ini proses sosialisasi yang terjadi adalah hasil dari musyawarah yang sudah dilakukan Kepala Kalurahan dan beberapa elemen diharapkan bisa disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas melalui perantara RT, RW maupun perangkat yang lain. Tetapi pada proses musyawarah terdapat elemen yang kurang memperhatikan apa yang sedang dimusyawarahkan. Hal itu pasti berdampak pada proses penyampaian pada masyarakat yang lebih luas karena kurang tersampainya pesan dengan baik pada saat musyawarah. Hal itu diungkapkan oleh Abdul Cholik selaku ketua RT yang sering diajak musyawarah di balai Kalurahan:

“sakjane akeh kumpulan-kumpulan nang balai deso, opo ae mesti diajak kumpul tapi yo gag tau ngrungokno..hahaha”(sebenarnya sering ada kumpul-kumpul di balai Kalurahan, apa saja pasti diajak kumpul tapi ya tidak pernah saya dengarkan.haha)(wawancara tanggal 23 Februari 2022).(data tersebut dapat dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan Imam Mawardi).

Komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk tercapainya suatu hasil yang diharapkan. Seperti pada kasus sembako murah, pada dasarnya program tersebut merupakan program yang sasarannya adalah masyarakat yang tidak mampu, tetapi banyak masyarakat yang tidak memahami, sehingga masih saja masyarakat yang tergolong mampu ingin ikut juga dalam program sembako murah tersebut.

- 2) Keterlambatan pembayaran pada program-program pinjaman

Ada beberapa program Kalurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Kalurahan Tepus, diantaranya adalah program KopWan (Koperasi Wanita), dan juga PDM-DKE yang sudah berjalan sejak 1997. Tetapi beberapa masyarakat Kalurahan yang ikut dalam program tersebut terlambat melakukan pembayaran, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tetapi apabila dibiarkan akan menjadi factor yang bisa menjadikan tidak berjalannya program yang sudah tertata dengan baik. Hal itu diungkapkan oleh Yetty P, sekretaris program KOPWAN.

“hambatan yang dialami selama program KOPWAN adalah ada beberapa anggota yang telat melakukan pembayaran, tapi itu masih wajar dan bukan merupakan masalah yang besar”. (wawancara pada tanggal 25 Februari 2022)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Syaiful Asy'ari, ketua Program PDM-DKE:

“PDM-DKE ini sudah berjalan sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, dan mungkin program PDM-DKE ini satu-satunya yang masih jalan di wilayah

kecamatan Ploso, hambatannya mungkin adalah telat bayar, penarikannya yang ruwet dan ada yang lari dan uangnya gag kembali".(wawancara pada tanggal 25 Februari 2022)

4. Solusi yang Diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
 - a. Meminimalisir pelaksanaan program pembangunan yang bekerja sama dengan CV
Pelaksanaan pembangunan sua-kelola ternyata merupakan solusi yang baik, mengingat buruknya kualitas pembangunan yang dikelola oleh CV. Seperti diungkapkan oleh Bapak Supardi:
"semoga untuk program pembangunan yang selanjutnya bisa dilaksanakan secara sua kelola agar hasilnya bisa lebih memuaskan dan masyarakat bisa mengawasi langsung proses pembangunan tersebut"(wawancara tanggal 23 Februari 2022)
 - b. Membentuk forum bersama
Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tersebut Kepala Kalurahan membentuk suatu forum yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari warga (RT, RW, BPD dan perangkat yang lain). "untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif, hasil musyawarah Kalurahan dengan RT, RW, BPD memutuskan untuk persoalan sembako diratakan pembagiannya dan diatur oleh pamong".(wawancara tanggal 23 Februari 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang telah peneliti lakukan maka bisa disimpulkan bahwa karakter masyarakat Kalurahan Tepus adalah masyarakat yang mudah diajak untuk berpartisipasi terhadap apapun yang bisa menjadikan Kalurahan lebih baik, tetapi masyarakat harus diberi tahu dahulu dan diberikan pengertian terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kalurahan, karena masyarakat Kalurahan Tepus merupakan masyarakat yang tidak selalu aktif untuk mencari informasi proses perkembangan Kalurahan tetapi mereka akan mau berkerja sama bila ada ajakan untuk ikut berpartisipasi. Program yang dilaksanakan di Kalurahan Tepus terdiri dari dua tipe yaitu: Pembangunan Infrastruktur (Program Fisik) dan Program Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Program non fisik).

Partisipasi masyarakat dalam hal ini ditunjukkan dengan bentuk ikut dalam hal perencanaan, pelaksanaan, tetapi belum ada partisipasi dalam hal evaluasi. Peran Kepemimpinan Kepala Kalurahan Tepus Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kalurahan adalah dengan cara MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Penggunaan strategi non finansial, Pendekatan terhadap Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartini, Kartono, 1994. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
Koentjaraningrat, 2004. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Moleong, Lexi J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya.
Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1999 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi .2011 Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi : Malang; Setara Press.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D : Bandung; Alfabeta Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.